

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Olahraga dipandang penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena olahraga menjadi sarana alternatif yang efektif dan efisien dalam kesehatan, pendidikan, sosialisasi, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tentu banyak hal yang perlu ditangani dan menjadi bagian pemerintah untuk mengelolanya. Untuk mengatur antara urusan pemerintah pusat dengan urusan pemerintah daerah, maka diaplikasikan sistem desentralisasi yang di mana terjadi perlimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai hubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sesuai dengan wahyu Allah SWT melalui Al-Qur'an surat Al-An'am (6): 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumanNya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “ (Center for Islamic Administration Studies FISIP UIN SGD Bandung, 2022)*

Ayat tersebut menyiratkan pemerintah sebagai pemimpin (khalifah) untuk dapat mengelola negara dengan beriman dan beramal shaleh. Seorang pemimpin yang baik harus menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi wilayah yang dipimpin (muka bumi). Selain itu pemimpin harus dapat memelihara keselamatan dan kebahagiaan bagi rakyat yang dipimpin.

Pemerintah sebagai *stakeholder* dalam melakukan urusan pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diatur dengan sistem otonomi daerah yang di mana setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur daerah otonomnya. Sistem otonomi daerah ini tertuang

dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang juga pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa, pemerintahan daerah berwenang untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Selaras dengan ketentuan otonomi daerah, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mengatur mengenai urusan pemerintah pada bidang olahraga yang menjadi urusan daerah otonom yang tertuang pada pasal 34 dan pasal 35. Adapun pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang mengatur lebih rinci terkait penyelenggaraan keolahragaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (2), urusan kepemudaan dan olahraga tergolong ke dalam urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Olahraga memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas, meskipun olahraga tidak terkait dengan pelayanan dasar. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk menerapkan kebijakan nasional tentang keolahragaan, mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan menerapkan standardisasi dan penjaminan mutu bidang keolahragaan di daerah provinsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Ini berarti pemerintah daerah provinsi Jawa Barat wajib untuk menyelenggarakan urusan keolahragaan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Barat. Sebagai bentuk pelaksanaan atas peraturan daerah tersebut maka dijelaskan siapa yang berkewajiban menjalankan urusan keolahragaan tersebut yang dimuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (DISPORA JABAR) sebagai perangkat daerah provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data dari *website* resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan KONI Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat tergolong unggul dalam bidang keolahragaan, hal ini dapat dilihat dari catatan prestasi olahraga JABAR *Hattrick* yaitu berhasil mempertahankan kejuaraan umum sebanyak tiga kali secara berturut-turut pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat tahun 2016 dengan total peraih 271 medali emas, 154 medali perak, dan 158 medali perunggu. Pada PON XX Papua tahun 2021 dengan total peraih 133 medali emas, 105 medali perak, dan 115 medali perunggu. PON XXI Aceh-Sumatera Utara tahun 2024 dengan peraih 195 medali emas, 164 medali perak dan 185 medali perunggu. Hal ini merupakan suatu peraih yang luar biasa dan menjadi kebanggaan bagi provinsi Jawa Barat atas prestasi yang berhasil diraih.

JABAR *Hattrick* merupakan seruan ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan peraih juara umum PON untuk ketiga kalinya pada tahun 2024. Jawa Barat berhasil meraih prestasi juara umum pada PON sebanyak tiga kali secara berturut-turut tidak lain karena peran pemerintah daerah Jawa Barat dalam membina, mengawasi, memfasilitasi atletnya dan juga melakukan koordinasi dengan mitra organisasi keolahragaan. Selain itu sumbangsih dari berbagai mitra organisasi yang menjalin kordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat terutama KONI, tentunya sangat berpengaruh pada peraih prestasi olahraga di provinsi Jawa Barat. Peraih prestasi olahraga pada ajang PON ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah provinsi Jawa Barat unntuk mencapai visi “Jawa Barat Juara” sebagaimana yang tertera pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Selain itu, hal tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dalam menempatkan pembangunan olahraga dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang sejahtera.

Mengutip dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2022, pada tahun 2019 – 2022 provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan presentase capaian prestasi

olahraga. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja yang termuat dalam gambar berikut.

**Gambar 1. 1**

**Perbandingan Pengukuran Capaian Tingkat Kinerja**



Sumber: LKIP Dispora Jawa Barat Tahun 2022

Pada data tersebut disajikan data realisasi tahun 2019-2022 di mana untuk rata-rata capaian tahun 2022 telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019 tingkat kinerja mencapai 70,33%, tahun 2020 capaian tingkat kinerja naik cukup besar dengan angka 20,63% yaitu 90,96%, pada tahun 2021 tingkat kinerja meningkat menjadi 96,27%, dan pada 2022 angka capaian tingkat kinerja mencapai 101,83 %. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menunjukkan kinerja yang positif. Namun pada tahun 2023 capaian kinerja akumulasi mencapai angka 101,83%, data ini dilihat dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dispora Jabar tahun 2023 yang berarti adanya stagnasi. Hal ini menunjukkan angka capaian kinerja tetap stabil sehingga tidak sepenuhnya mengartikan kinerja yang kurang baik, namun tentu terdapat hambatan serta tantangan sehingga angka capaian kinerja tidak meningkat dibandingkan tahun 2022.

Pada data LKIP Dispora Jabar tahun 2023 tentang pengukuran pencapaian indikator kinerja terdapat beberapa diantaranya mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan, di mana salah satu sasaran program yaitu meningkatnya

prestasi olahraga tidak sesuai dengan target kinerja. Hal ini dapat disimpulkan dengan melihat gambar dengan sajian tabel berikut.

**Gambar 1. 2**

**Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya prestasi pemuda Jawa Barat di Tingkat Nasional di bidang kewirausahaan, Organisasi dan Kepeloporan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Persen	18	18	100,00	Sangat Baik
		Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dalam kondisi baik	Persen	72	57	79,17	Baik
		Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	3	3,1	103,33	Sangat Baik
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	8	8	100,00	Sangat Baik
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPNAS	Persen	20	15	75,00	Baik
		Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional POPWILNAS	Persen	0	0		
		Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	87	55	63,22	Baik

Sumber: LKIP Dispora Jawa Barat Tahun 2023

Pada tabel yang termuat dalam gambar di atas, sasaran program meningkatnya prestasi olahraga pada indikator kinerja *event* nasional POPNAS dan indikator kinerja sarana dan prasarana olahraga mengalami kondisi kurang baik. Hal ini dilihat dari kurangnya capaian kinerja dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor kegagalan atlet Jawa Barat dalam meraih medali dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya investasi dan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan atlet. Tanpa adanya anggaran yang cukup untuk pengembangan infrastruktur olahraga, pelatihan, dan kompetisi, atlet Jawa Barat mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai performa terbaik mereka. Infrastruktur olahraga yang kurang memadai, kurangnya fasilitas dan infrastruktur olahraga yang berkualitas dapat menghambat persiapan dan performa atlet.

Selaras dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat bahwa bidang peningkatan prestasi olahraga bertugas untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga yang mencakup pembibitan olahraga prestasi, pengembangan olahraga prestasi, tenaga dan organisasi olahraga prestasi. Ruang lingkup tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab kepala bidang peningkatan prestasi olahraga DISPORA JABAR. Peran pemimpin sangat mempengaruhi berjalannya roda organisasi dalam mencapai tujuan. Berjalannya suatu organisasi bergantung pada komponen yang menggerakkan organisasi tersebut, pemimpin memegang peran dalam melakukan pengambilan keputusan, memotivasi bawahan, mempengaruhi bawahan, peran antar pribadi dan juga peran informasional.

Berdasarkan hasil penelitian di DISPORA JABAR peneliti menduga, peran pemimpin birokrasi belum berhasil dijalankan disebabkan oleh peranan kepemimpinan belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada peran kepemimpinan birokrasi menurut (Pasolong, 2015) dalam peran pengambilan keputusan dengan indikator pengambilan keputusan yang tepat. Pernyataan tersebut didasarkan pada Gambar 1.2 **Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Program Dispora Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**, yang menunjukkan bahwasannya realisasi kinerja tidak mencapai target kinerja. Sesuai dengan pokok bahasan pada penelitian ini yaitu peranan kepemimpinan dalam peningkatan prestasi olahraga, maka dilihat pada sasaran program ‘meningkatnya prestasi olahraga’ yang tidak mencapai target, peneliti menduga adanya masalah dalam perencanaan program prestasi olahraga tepatnya di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Budaya birokrasi di lokasi penelitian berbeda dengan instansi pemerintah lainnya yang terlihat lebih formal. Untuk itu, fenomena ini menarik perhatian juga penting ditelusuri secara mendalam untuk memberikan gambaran melalui cara mendeskripsikan peranan kepemimpinan birokrasi dari pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga sehingga dapat mengetahui keberhasilan dari peranan kepemimpinan birokrasi dalam peningkatan prestasi olahraga. Adapun judul

penelitian yang diangkat berdasarkan paparan tersebut yaitu **“Peranan Kepemimpinan dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun peneliti menguraikan rumusan masalah yang telah melalui tahapan identifikasi dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga dalam pengambilan keputusan?
2. Bagaimana cara pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga dalam mempengaruhi bawahan untuk mencapai peningkatan prestasi olahraga?
3. Bagaimana peranan pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga dalam memotivasi bawahan serta atlet olahraga prestasi dalam mencapai tujuan organisasi?
4. Bagaimana peranan pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga memposisikan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi guna memberikan kesan pribadi yang baik?
5. Bagaimana peranan informasional pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga dalam berkomunikasi dengan bawahan, atlet maupun dengan organisasi lain?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, peneliti menguraikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peranan pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga dalam pengambilan keputusan.
2. Mendeskripsikan cara pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga dalam mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Mendeskripsikan cara kerja pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga memotivasi bawahan serta atlet olahraga prestasi dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Mendeskripsikan perilaku pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga memposisikan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi guna memberikan kesan pribadi yang baik.
5. Mendeskripsikan peran informasional pimpinan bidang peningkatan prestasi olahraga dalam berkomunikasi dengan bawahan, atlet maupun dengan organisasi lain.

#### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi media pembelajaran bagi para akademisi maupun birokrat dalam keilmuan administrasi publik khususnya teori kepemimpinan. Kemudian pendekatan dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat menghasilkan keilmuan yang bermanfaat di bidang pemerintahan dan menjadi bahan kajian bagi pemimpin di pemerintahan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara sosial atau praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menyumbangkan sumbangsih nyata dalam pengembangan konsepsi kepemimpinan, khususnya dalam konteks penataan organisasi ke depan. Khususnya kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Kiranya hasil penelitian ini juga dapat menjadi umpan balik yang berharga untuk mengidentifikasi peran kepala bidang peningkatan prestasi olahraga sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab atas peningkatan prestasi olahraga di Jawa Barat yang kemudian dapat menjadi bahan kajian ulang baik bagi para praktisi maupun akademisi sehingga dapat menentukan atau menilai kepemimpinan yang tepat untuk menjalankan peran sebagai seorang pemimpin tingkat menengah.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Merujuk pada judul penelitian yang peneliti angkat yaitu ‘Peranan Kepemimpinan dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat’, peneliti mengaplikasikan teori Administrasi Publik

sebagai *Grand Theory* yang mendasari penelitian ini. Menurut Nigro & Nigro (1992) dalam (Tresiana & Duadji, 2018) mengatakan bahwa:

“Administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislative, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat”.

Kemudian peneliti menerapkan teori Perilaku Organisasi sebagai *Middle Theory* pada penelitian ini, dikarenakan peranan kepemimpinan merupakan tingkah laku atau perilaku dari individu dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kelompok dan organisasi. Begitupun menurut (Tantowi, 2014), bahwa “perilaku organisasi melihat organisasi terdiri dari tingkat, bergerak naik dari individu, ke kelompok, dan ke seluruh struktur organisasi”.

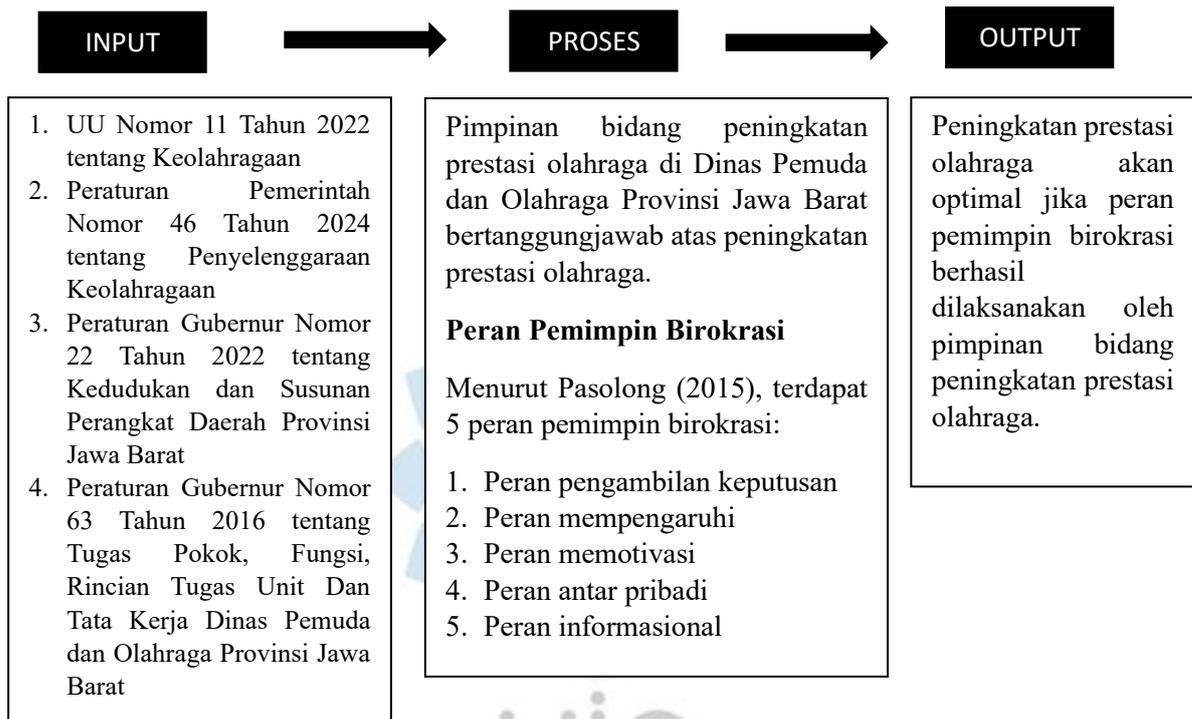
Pada *Operational Theory*, peneliti menggunakan teori peran kepemimpinan dalam perspektif birokrasi yang merujuk pada buku ‘Kepemimpinan Birokrasi’ karya Harbani Pasolong, 2015. Menurut (Pasolong, 2015) bahwa “kepemimpinan dalam suatu birokrasi sangat penting, oleh karena pemimpinlah yang dapat membuat keputusan, memotivasi bawahan melaksanakan keputusan yang telah dibuat, dan pemimpinlah juga yang mengawasi pelaksanaan tersebut agar dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan”. Adapun lima peran pemimpin birokrasi menurut (Pasolong, 2015) ialah:

1. Peran pengambilan keputusan;
2. Peran mempengaruhi;
3. Peran memotivasi; dan
4. Peran antar pribadi; dan
5. Peran informasional.

Melalui gambaran pemikiran tersebut, peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut:

**Gambar 1.3**

**Kerangka Berpikir**



**Sumber:** Pasolong, H. (2015). *Kepemimpinan Birokrasi (Keempat)*. Bandung. Alfabeta

**F. Proposisi**

Peranan kepemimpinan bidang prestasi olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan prestasi olahraga dengan berhasil jika didukung oleh peran pemimpin birokrasi dalam peran merencanakan, pengorganisasian, mengawasi dan mengevaluasi.